

NEGARA-NEGARA DI NUSANTARA

Dari Negara-Kota hingga Negara-Bangsa
Dari Modernisasi hingga Reformasi Administrasi

SAMODRA WIBAWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAGIAN PERTAMA	
BAB 2 PEMERINTAHAN DI NUSANTARA HINGGA 1945: DARI NEGARA KOTA HINGGA NEGARA BANGSA	5
2.1. Nusantara kuno	5
2.2. Nusantara jaman Hindu-Budha	8
2.3. Nusantara jaman Islam	17
2.4. Nusantara di bawah kekuasaan Eropa	22
2.4.1. Periode Portugis dan Spanyol	22
2.4.2. Periode awal Belanda: VOC	25
2.4.3. Pemerintahan sementara Inggris	31
2.4.4. Kembalinya Belanda dan Perang Jawa	36
2.4.5. Sistem tanam paksa ke-dua	38
2.5. Pemerintahan Hindia Belanda sejak 1855	44
2.5.1. Model pemerintahan dan administrasi.	44
2.5.2. "Politik etis" dan desentralisasi 1903	52
2.5.3. Gerakan nasional dan Perang Dunia I	56
2.6. Indonesia di bawah pemerintahan militer Jepang	68
BAB 3 REPUBLIK INDONESIA	79
3.1. Pemerintahan Republik Indonesia per UUD	81
3.2. Republik Indonesia <i>in action</i>	88

3.3. Republik Indonesia di tengah revolusi dan konflik	97
3.3.1. Revolusi sosial	97
3.3.2. Konflik multi aspek	101
3.4. Republik Indonesia Serikat	119
3.5. Republik Indonesia ke-tiga	123
3.6. Republik ke-empat: UUD 1945 plus Komunis	131
BAB 4 REPUBLIK INDONESIA SEJAK 1966	138
4.1. Republik ke-lima: UUD 1945 plus kapitalisme	138
4.2. Republik Indonesia terdesentralisasi	157
4.3. Republik Indonesia direformasi	162
4.4. Kesimpulan dan Komentar	166
BAGIAN KE-DUA	
BAB 5 SEJARAH KEBIJAKAN DAN PEMIKIRAN ADMINIS-	
 TRASI NEGARA DI INDONESIA	179
5.1. Rasionalisasi administrasi: mengatasi kelangkaan dana	180
5.2. Administrasi pembangunan: menciptakan kesejahteraan	184
5.3. Penyempurnaan administrasi: mengejar efektivitas dan efisiensi	191
5.4. Reformasi administrasi: menghapus otokrasi	199
5.5. Pembaharuan (modernisasi) administrasi: menyambut globalisasi	206
5.6. Reorientasi birokrasi: membangkitkan enterpreneurialisme	212
5.7. Reformasi administrasi ke-dua: desakralisasi dan dekonstruksi negara (atau rasionalisasi dan demokratisasi lagi)	218
5.8. Rangkuman	221
EPILOG	225
DAFTAR PUSTAKA	228

DAFTAR GAMBAR

2.1. Struktur administrasi kerajaan di Nusantara abad ke-4	9
2.2. Struktur kekuasaan tak langsung VOC (1602-1807) dan pemerintah kolonial Belanda	34
2.3. Struktur administrasi langsung pemerintah kolonial Inggris (1811-1816)	35
2.4. Struktur perundang-undangan dalam pemerintahan Hindia Belanda	45
2.5. Hierarkhie administrasi kolonial Hindia Belanda sejak 1855	47
2.6. Struktur pemerintahan Hindia Belanda sejak 1905	55
2.7. Struktur pemerintahan Hindia Belanda sejak 1922 di Jawa dan luar Jawa	63
2.8. Struktur pemerintahan Jepang sejak September 1943	72
2.9. Struktur pemerintahan Indonesia Timur sejak 1942	75
3.1. Struktur pemerintahan RI per UUD 1945	82
3.2. Propinsi-propinsi di Indonesia menurut sidang KNI, 19 Agustus 1945	90
3.3. Hierarkhie kekuasaan riil RI beberapa minggu setelah proklamasi	95
3.4. Struktur pemerintahan Daerah per UU No. 1/1945	105
3.5. Struktur pemerintahan Daerah per UU No. 22/1948	118
3.6. Struktur pemerintahan Daerah per UU No. 1/1957	129
3.7. Struktur pemerintahan Daerah dalam praktik sejak Januari 1957	130
3.8. Struktur pemerintahan Daerah per Penpres No. 6/1959 dan 5/1960	133
3.9. Struktur pemerintahan Daerah per UU No. 18/1965	135
4.1. Struktur pemerintahan Daerah per UU No. 5/1974	143
4.2. Struktur pemerintahan RI sejak 1974	145

4.3. Struktur pemerintahan Daerah per UU No. 22/1999	164
5.1. Paradoks pembangunan I: tesis, konsekuensi dan akibat	189
5.2. Paradoks pembangunan II: dari aktif ke pasif	204
5.3. Model-model perubahan administrasi di Indonesia	223